

**LAPORAN BULANAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
BULAN DESEMBER TAHUN 2023**



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

Jl. Raya Sentani - Waena

Telp. 0967-574160 Website: ptun-jayapura.go.id

Email: ptun.jayapura@gmail.com

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul	
Daftar Isi	1
Daftar Tabel	3
Bab I. PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Sejarah Singkat	5
C. Maksud Dan Tujuan	8
D. Sistematika Penyusunan Laporan	8
BAB II. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	9
A. Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara.	9
B. Tugas Pokok.	9
C. Fungsi.	9
D. Manajemen Kepaniteraan.	10
Struktur Organisasi.	10
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepaniteraan.	11
E. Manajemen Kesekretariatan	17
1. Struktur Organisasi.	17
2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kesekretariatan.	18
BAB. III Kesimpulan Dan Rekomendasi.	32
A. Kesimpulan.	32
B. Rekomendasi.	32
LAMPIRAN	33
Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran Manual DIPA 005.01.	34
Lampiran 2 : Laporan Realisasi Anggaran Manual DIPA 005.05.	37
Lampiran 3 : Laporan Realisasi PNBPA 005.01.	40
Lampiran 4 : Laporan Realisasi PNBPA 005.05.	43
Lampiran 5 : Laporan Perkara (LI-T1,LI-T2,LI-T3,LI-T4, LI- T5, LI-T6).	46

DAFTAR TABEL		Hal
Tabel 1.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua.	5
Tabel 2.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Barat.	6
Tabel 3.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Selatan.	6
Tabel 4.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Tengah.	6
Tabel 5.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Pegunungan.	7
Tabel 6.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Barat Daya.	7
Tabel 7.	Pergantian Pucuk Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	7
Tabel 8.	Laporan Keadaan Perkara Bulan Desember Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	12
Tabel 9.	Laporan Jenis Perkara Bulan Desember Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	12
Tabel 10.	Keadaan Keuangan Perkara Bulan Desember Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	13
Tabel 11.	Biaya Proses/ATK/Pemberkasan Bulan Desember Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	13
Tabel 12.	Biaya Eksekusi s.d Bulan Desember Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	14
Tabel 13.	Buku Register Meja Informasi Bulan Desember Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	15
Tabel 14.	Buku Register Pelayanan Posbakum bulan Desember Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	16
Tabel 15.	Pagu Anggaran DIPA 005.01 sampai Bulan Desember Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	18
Tabel 16.	Pagu Anggaran DIPA 005.01 sampai Bulan Desember Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	18

Tabel 17.	Realisasi Anggaran DIPA 005.01 Bulan Desember 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	19
Tabel 18.	Realisasi Anggaran DIPA 005.01 Bulan Desember 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	19
Tabel 19.	Realisasi Penerimaan PNBPN Bulan Desember Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	19
Tabel 20.	Data Rumah Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	20
Tabel 21.	Data Peruntukan Rumah Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	20
Tabel 22.	Data Kendaraan Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	20
Tabel 23.	Keadaan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	22
Tabel 24.	Data Surat Masuk dan Surat Keluar Periode Desember Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	25
Tabel 25.	Sumber Daya Manusia Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	26
Tabel 26.	Pangkat/Golongan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	27
Tabel 27.	Jabatan Fungsional yang Diperbantukan pada Jabatan Administrasi Lainnya	28
Tabel 28.	Tenaga Honorer yang Diperbantukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	28
Tabel 29.	Data Promosi dan Mutasi Bulan Desember pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	30

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Bulanan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ini adalah penyampaian hasil pelaksanaan tugas pekerjaan dan kegiatan pelaksanaan tugas selama satu bulan yaitu bulan Desember secara umum, kebijakan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Pengadilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI, Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu Institusi Negara / Kepemimpinan sesuai Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada dipercayakan ke publik.

Dalam melaksanakan tupoksi dan kebijakan di bidang pelayanan administrasi Peradilan Umum, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura mengacu kepada Visi dan Misi Mahkamah Agung RI yaitu:

Visi:

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”

Misi:

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas aparatur Badan Peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.

Berdasarkan visi dan misi diatas, dikembangkanlah nilai-nilai utama Mahkamah Agung. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar perilaku seluruh warga badan peradilan dalam upaya mencapai visinya. Pelaksanaan dari nilai-nilai ini pada akhirnya akan membentuk budaya badan peradilan. Terdapat 8 nilai utama, antara lain:

1. Kemandirian
2. Integritas

- 3. Kejujuran
- 4. Akuntabilitas
- 5. Responsibilitas
- 6. Keterbukaan
- 7. Ketidakberpihakan
- 8. Perlakuan yang sama di hadapan hukum

Oleh karena itu 8 nilai utama Mahkamah Agung harus tertancap kuat dan diimplementasikan dalam pikiran, ucapan, serta tindakan setiap individu dalam kehidupan berorganisasi dengan pola pikir yang melayani masyarakat, profesionalitas kinerja yang tinggi, dan berorientasi pada hasil.

B. Sejarah Singkat

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1993. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berkedudukan di Jln. Raya Sentani – Waena Jayapura.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura mempunyai tugas pokok memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang bersifat final dan mengikat .

Sedangkan Wilayah Hukum operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Adalah Wilayah Hukum Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: W4-TUN4/2538/HK.00.08/XII/2019 Tentang Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, yaitu:

I. Provinsi Papua

Tabel 1. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kota Jayapura	Jayapura
2.	Kabupaten Jayapura	Sentani
3.	Kabupaten Keerom	Waris
4.	Kabupaten Sarmi	Sarmi
5.	Kabupaten Waropen	Botawa
6.	Kabupaten Supiori	Sorendiweri
7.	Kabupaten Mamberamo jaya	Burmeso
8.	Kabupaten Kepulauan Yapen	Serui

II. Provinsi Papua barat

Tabel 2. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Barat

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kabupaten Fak-fak	Fak-fak
2.	Kabupaten Kaimana	Kaimana
3.	Kabupaten Manokwari	Manokwari
4.	Kabupaten Manokwari Selatan	Ransiki
5.	Kabupaten pegunungan Arfak	Anggi
6.	Kabupaten Teluk Bintuni	Bintuni
7.	Kabupaten Teluk Wondama	Rasiei

III. Provinsi Papua Selatan

Tabel 3. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Selatan

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kabupaten Merauke	Merauke
2.	Kabupaten Boven Digoel	Tanah Merah
3.	Kabupaten Mappi	Kepi
4.	Kabupaten Asmat	Agats

IV. Provinsi Papua Tengah

Tabel 4. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Tengah

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kabupaten Nabire	Nabire
2.	Kabupaten Paniai	Enarotali
3.	Kabupaten Mimika	Timika
4.	Kabupaten Dogiyai	Kigamani
5.	Kabupaten Intan Jaya	Sugapa
6.	Kabupaten Deiyai	Tigi
7.	Kabupaten Puncak	Ilaga
8.	Kabupaten Puncak Jaya	Mulia

V. Provinsi Papua Pegunungan

Tabel 5. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Pegunungan

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kabupaten Jayawijaya	Wamena
2.	Kabupaten Pegunungan Bintang	Oksibil
3.	Kabupaten Yahukimo	Sumohai
4.	Kabupaten Tolikara	Karubaga
5.	Kabupaten Mamberamo Tengah	Kobakma
6.	Kabupaten Yalimo	Elekmi
7.	Kabupaten Lanny Jaya	Tiom
8.	Kabupaten Nduga	Kenyam

VI. Provinsi Papua Barat Daya

Tabel 6. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Barat Daya

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kota Sorong	Sorong
2.	Kabupaten Sorong	Aimas
3.	Kabupaten Sorong Selatan	Teminabuan
4.	Kabupaten Maybrat	Kamurkek
5.	Kabupaten Tambrauw	Fef
6.	Kabupaten Raja Ampat	Waisai

Sejak beroperasi pada tahun 1993 sampai dengan saat ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah mengalami pergantian pucuk pimpinan sebanyak 14 kali yaitu sebagai berikut:

Tabel 7. Pergantian Pucuk Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	NAMA	MASA JABATAN
1	LAY MINGGUS, SH	Periode 1994 – 1997
2	SAMUEL TULAK, SH	Periode 1997 – 1999
3	DRS YANSON P. SITORUS, SH., MH	Periode 1999 – 2002
4	ANDI LUKMAN, SH	Periode 2002 – 2004
5	SANTER SITORUS, SH., M.HUM	Periode 2004 – 2006
6	ULUAN M. HUTAGALUNG, SH	Periode 2006 – 2007
7	AGUS WAHYU RAHARDI, SH., MH	Periode 2007 – 2009

8	ASMIN SIMANJORANG, SH	Periode 2009 – 2011
9	JAMRES SARAAN, SH	Periode 2011 – 2013
10	KASIM, SH.,MH	Periode 2013 – 2015
11	SINGGIH WAHYUDI, SH	Periode 2015 – 2017
12	IMANUEL MOUW, SH	Periode 2018 – 2020
13	MASDIN, S.H., M.H	Periode 2020 – 2023
14	JUSAK SINDAR, S.H	Periode 2023 – sekarang

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dibuatnya laporan bulanan ini adalah untuk memberikan informasi kinerja dan indikator capaian tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Pengadilan Tingkat Banding yang membawahi wilayah hukumnya selama satu bulan periode pelaporan.

Tujuan dibuatnya laporan bulanan ini untuk memberikan dan menyediakan data dukung yang dibutuhkan oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai data sumber penyusunan laporan bulanan, semester dan tahunan serta sebagai bahan informasi dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Peradilan Tata Usaha Negara Jayapura yang berada di wilayah hukumnya. Dan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura laporan bulanan ini bermanfaat sebagai laporan hasil capaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat menjadi bahan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan.

D. Sistematika Penyusunan Laporan

Mekanisme penyusunan laporan ini memanfaatkan aplikasi Sistem SIPACE yang dikembangkan oleh Pranata Komputer Tingkat Pertama. Adapun sistematika penyajian laporan ini dapat diuraikan antara lain :

Bab I. Pendahuluan menguraikan mengenai latar belakang penyusunan laporan, maksud dan tujuan dan lingkup pekerjaan dan manfaat dokumen laporan bulanan dengan keterkaitannya terhadap laporan

Bab II. Menguraikan pelaksanaan kedudukan, tugas pokok dan fungsi pada bulan berkenaan.

Bab III. Penutup yang menguraikan kesimpulan dan saran.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 perubahan kedua Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar.

B. Tugas Pokok

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara Tata Usaha Negara di tingkat pertama, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

C. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama;
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara (kepegawaian, Perencanaan IT dan pelaporan, umum dan keuangan).
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Tata Usaha Negara pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta;
5. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum.

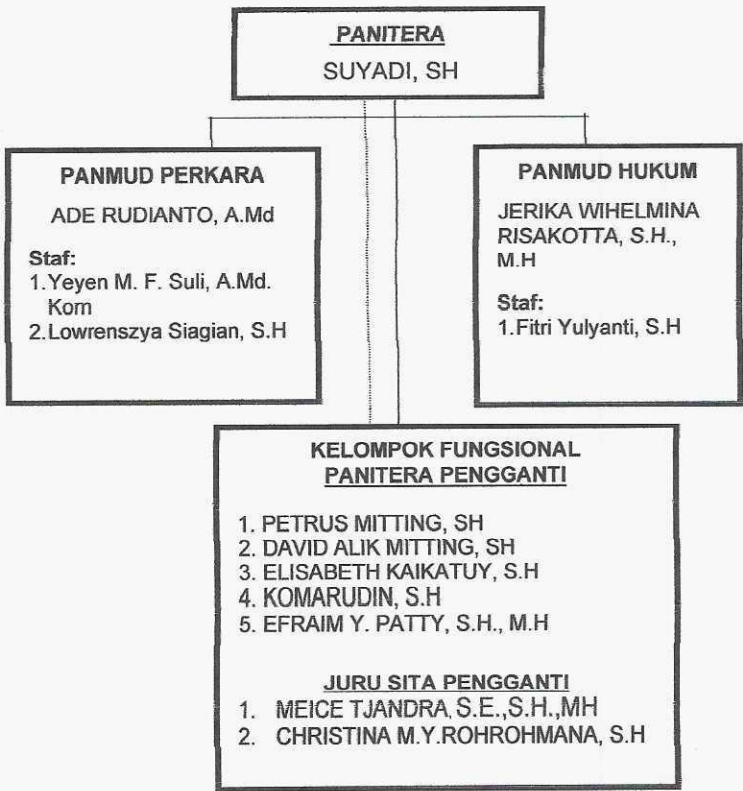
D. Manajemen Kepaniteraan

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dipimpin oleh Panitera, mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura menyelenggarakan fungsi:

- 1. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- 2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara;
- 3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- 4. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- 5. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
- 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

1. Struktur Organisasi Kepaniteraan

Struktur organisasi kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepaniteraan

Pada bab VI tentang Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara, Bagian Ketiga Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Susunan organisasi kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A terdiri atas:

a. Kepaniteraan Muda Perkara; Mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang tata usaha negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Panitera Muda Perkara menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan berkas perkara gugatan/sengketa tata usaha negara;
- 2) pelaksanaan registrasi perkara gugatan/sengketa tata usaha negara;
- 3) pelaksanaan penelitian administrasi gugatan/sengketa tata usaha negara;
- 4) pelaksanaan penyerahan berkas perkara gugatan/sengketa tata usaha negara kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Panitera untuk ditetapkan apakah perkara tersebut dismissal atau tidak, jika tidak akan ditetapkan atau ditunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa.
- 5) pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- 6) pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak;
- 7) pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- 8) pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung;
- 9) pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- 10) pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 11) pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- 12) pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- 13) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan Kepaniteraan Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada bulan Desember 2023 dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Laporan Keadaan Perkara dan Jenis Perkara

1.1. Laporan Keadaan Perkara

Laporan Keadaan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura periode bulan Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 8. Laporan Keadaan Perkara Bulan Desember Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	PERKARA	SISA BLN	MASUK	PUTUS	SISA	KETERANGAN			
		LALU	BLN INI	BLN INI	SD BLN INI	CABUT	GUGUR	PLW	DISMISAL
1	Gugatan	10	-	1	9	1	-	-	-
2	Banding	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kasasi	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PK	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Eksekusi	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Laporan Jenis Perkara

Laporan Jenis Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura periode bulan Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 9. Laporan Jenis Perkara Bulan Desember Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	JENIS PERKARA	SISA BLN LALU	BULAN INI	S/D BLN INI
1	Pertanahan	7	-	7
2	Kepegawaian	1	-	1
3	Perijinan	-	-	-
4	Lingkungan Hidup	-	-	-
5	Tender/Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-
6	Badan Hukum/Parpol	-	-	-
7	Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	-	-
8	Kepala Daerah	-	-	-
9	Proses Pemilihan Umum	-	-	-
10	Penggantian Antar Waktu	-	-	-
11	Ketenaga Kerjaan	-	-	-
12	KIP	-	-	-
13	Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Umum	-	-	-
14	Permohonan Fiktif Positif	-	-	-
15	Penyalahgunaan wewenang	-	-	-
16	Tindakan Administrasi Pemerintahan	-	-	-
17	Tindakan Faktual	-	-	-
18	Merek	-	-	-
19	Lain-lain	2	-	2
Total		10	-	10

1.3. Keadaan Keuangan Perkara Bulan Desember 2023

Tabel 10. Keadaan Keuangan Perkara Bulan Desember Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	54,302,000	-	-	54,302,000
2	Penerimaan	-	7,364,500	-	7,364,500
3	Alat Tulis Kantor	-	-	375,000	375,000
4	Biaya Panggilan	-	-	151,000	151,000
5	Biaya Pemberitahuan	-	-	459,000	459,000
6	Biaya Pemeriksaan setempat	-	-	-	-
7	Biaya Pemberkasan dan Pengiriman Berkas	-	-	600,000	600,000
8	Biaya Pengiriman Perkara	-	-	-	-
9	Materai	-	-	-	-
10	PNBP:	-	-	-	-
	a. Biaya Pendaftaran	-	-	250,000	250,000
	b. Redaksi	-	-	-	-
	c. PNBP Lain-lain	-	-	824,500	824,500
11	Pengembalian Sisa Panjar kepada Pihak	-	-	-	-
12	Pengembalian Sisa Panjar kepada Negara	-	-	-	-
13	Biaya Lain-lain	-	-	-	-
	Jumlah	54,302,000	7,364,500	2,347,500	59,319,000

1.4. Biaya proses/ATK/Pemberkasan s.d Bulan Desember 2023

Tabel 11. Biaya Proses/ATK/Pemberkasan Bulan Desember Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	12,226,500			12,226,500
2	Penerimaan		375,000		375,000
3	Pengeluaran (untuk seluruh pembelian ATK secara riil, tidak perlu dirinci satu persatu)			-	-
	Jumlah	12,226,500	375,000	-	12,601,500

1.5. Biaya Eksekusi s.d Bulan Desember 2023

Tabel 12. Biaya Eksekusi s.d Bulan Desember Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	1,521,000	-	-	1,521,000
2	Penerimaan	-	-	-	-
3	Materai	-	-	-	-
4	Biaya Surat Panggilan	-	-	-	-
5	Biaya Surat Pemberitahuan	-	-	86,000	86,000
6	Hak-hak Kepaniteraan	-	-	20,000	20,000
7	Surat Pemberitahuan kepada Presiden/DPR	-	-	-	-
8	Pengumuman Media Cetak	-	-	-	-
9	Lain-lain	-	-	-	-
	Jumlah	1,521,000	-	106,000	1,415,000

1.6. Laporan Pelaksanaan SIPP

Secara umum penanggung jawab pelaksanaan SIPP adalah seluruh stake holder yang berkepentingan dalam alur/bisnis proses perkara. Aplikasi SIPP yang telah berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah SIPP Versi 5.0.0. Rasio penanganan perkara sampai dengan akhir bulan Desember Tahun 2023 adalah 75,51%. Kendala teknis pengisian aplikasi diantaranya adalah gangguan pada jaringan internet sedangkan non teknis terkait dukungan sumber daya manusia, sarana dan prasarana sudah berjalan dengan baik.

b. Kepaniteraan Muda Hukum

Mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- d. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- e. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- f. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada bulan Desember 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan Pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan

Pengelolaan dan pelayanan meja informasi mengacu pada SK KMA No.144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan yang telah diperbarui dengan SK KMA No. 1-144KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah memiliki sarana meja informasi dan meja pengaduan. Petugas meja informasi telah ditetapkan melalui SK Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: W4-TUN4/110/HM.02.3/I/2023 tentang Pengelola Meja Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Dan petugas meja pengaduan telah ditetapkan melalui SK Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: W4-TUN4/109/HM.02.3/I/2023 tentang Pelayanan Pengaduan. Sarana lainnya telah tersedianya buku register meja informasi dan pengaduan.

Tabel 13. Buku Register Meja Informasi Bulan Desember Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	PEMOHON	TGL DITERIMA	OBYEK PEMOHON	TINDAK LANJUT
1	Steven Fakdawer	14/12/2023	Salinan Putusan Perkara Nomor 18/G/2023/PTUN.JPR	Mendapat Salinan Putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah menyiapkan sarana meja pengaduan dan petugas meja pengaduan telah ditunjuk melalui SK Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Bulan ini tidak terdapat Pengaduan yang terdaftar pada buku register Bulan Desember 2023.

2. Pelayanan dan Kegiatan Posbakum

Tabel 14. Buku Register Pelayanan Posbakum bulan Desember Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO.	PEMOHON	JENIS JASA	JUMLAH JAM LAYANAN	KET
1	Veni Griet De Fretes	Konsultasi Hukum terkait Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak	1 Jam	-
2	Lizah F. Mandosir	Konsultasi terkait masalah pemutusan hubungan kerja	1 Jam	-
3	Jibrael Gusti Waroi	Konsultasi hukum terkait masalah tanah	1 Jam	-
4	Antoni Ance Waromi	Konsultasi hukum terkait gugatan cerai	1 Jam	-
5	Sungai Fonataba	Konsultasi terkait penambahan marga	1 Jam	-
6	Immanuel M. Waromi	Konsultasi Hukum terkait pencemaran nama baik	1 Jam	-
7	Yan Melki Maniani	Konsultasi terkait nama dalam DPO tindak pidana	1 Jam	-
8	Rosalindo Pulalo	Konsultasi hukum terkait tanah	1 Jam	-
9	Karulino Karubaba	Konsultasi terkait pengangkatan anak	1 Jam	-
10	Gerson Rampalo	Konsultasi hukum terkait sengketa tanah	1 Jam	-
11	Husrian	Konsultasi hukum terkait penambahan marga	1 Jam	-
12	Urix Wasturi	Konsultasi hukum terkait penambahan marga	1 Jam	-
13	Romean Habary	Konsultasi terkait pengajuan kasasi	1 Jam	-
14	Lizah Febriyanti	Konsultasi Hukum terkait pemutusan hubungan kerja sepihak	1 Jam	-
15	Markus Marani	Konsultasi hukum terkait permohonan perbaikan akta kelahiran anak	1 Jam	-
16	Natalia Setianingsih Ayu	Konsultasi Hukum terkait hak asuh anak	1 Jam	-
17	Djems Bindosano	Konsultasi Hukum terkait masalah tanah	1 Jam	-
18	Matahari Saputri Ali	Konsultasi hukum terkait masalah hak asuh anak	1 Jam	-
19	Juria Suriani Marani	Konsultasi hukum terkait permohonan penambahan marga	1 Jam	-
20	Marlin Y. Wamemon	Konsultasi Hukum terkait masalah PTDH dari Dinas Kepolisian Polda Papua	1 Jam	-

3. Tata Kelola Arsip Perkara

Pengelolaan arsip perkara dibedakan kedalam arsip perkara yang masih aktif (perkara yang belum putus atau masih dalam proses upaya hukum) berada pada kepaniteraan perkara, sedangkan arsip perkara yang sudah putus dan berkekuatan hukum tetap, dilimpahkan ke Kepaniteraan Hukum kepada Panitera Muda Hukum.

Arsip perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, dipindahkan dari ruang Kepaniteraan Hukum ke tempat ruang penyimpanan arsip perkara dengan luas penyimpanan yang tergolong kecil dan kurang memadai untuk menyimpan arsip perkara dalam jumlah banyak.

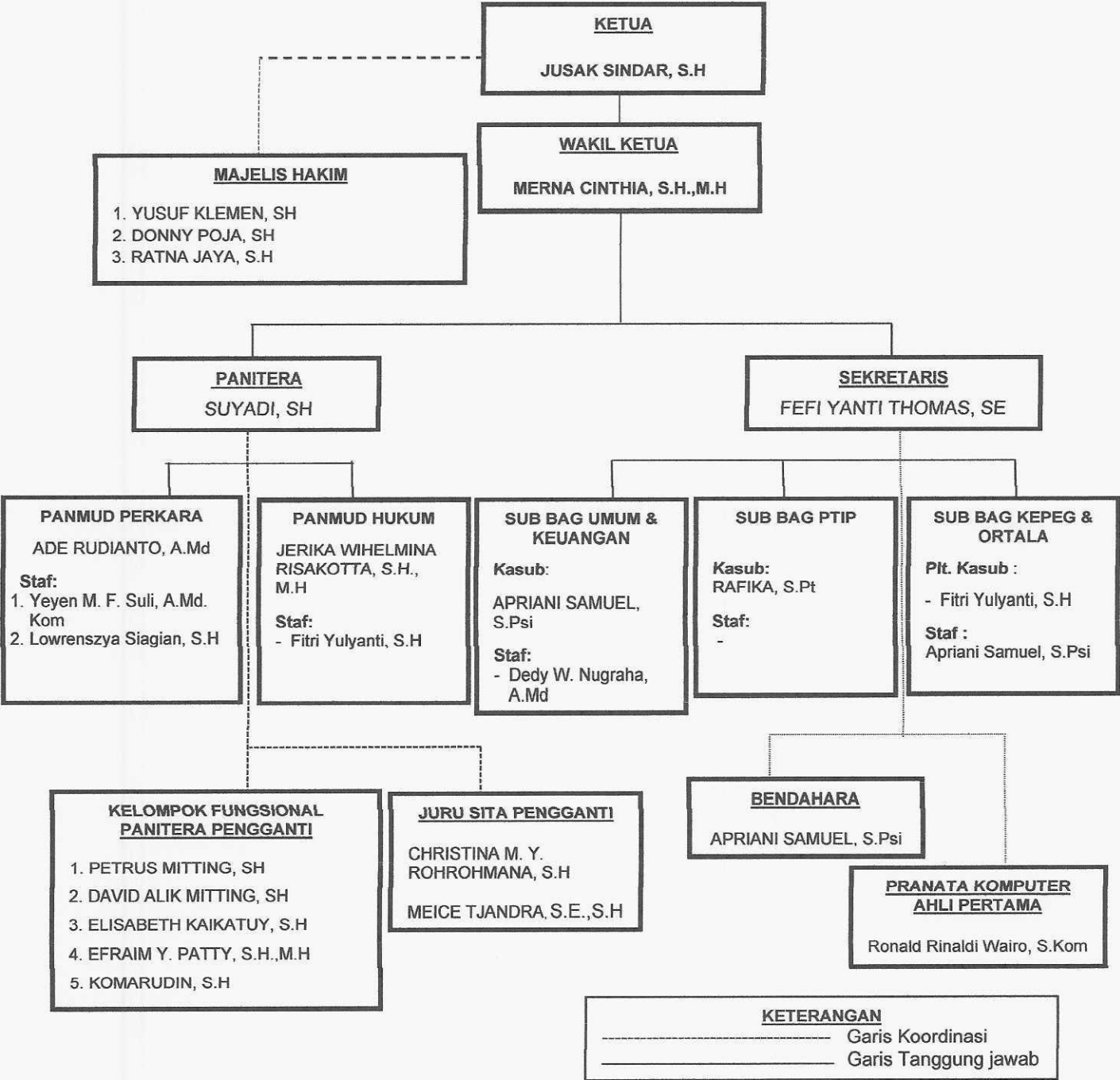
Ruang arsip perkara telah menempati ruang khusus pengarsipan yang terletak di ruangan arsip perkara. Telah dilakukan pelabelan nomor perkara pada berkas perkara.

E. Manajemen Kesekretariatan

1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan telah mengatur kedudukan, tugas dan fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada peradilan dibawahnya. Susunan struktur organisasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
(Sesuai Perma No. 7 Tahun 2015)



2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kesekretariatan

Sebagaimana tersebut pada Bab XI Bagian Ketiga Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tugas pokok dan fungsi Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A. Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A dipimpin

oleh Sekretaris. Berdasarkan hal tersebut di atas, Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terdiri atas:

1) Sub Bagian Umum dan Keuangan

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan. Untuk pelaksanaan kegiatan pada bulan Desember 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Anggaran

- ❖ Pagu Anggaran DIPA 01 PTUN Jayapura Tahun 2023 sampai dengan bulan Desember 2023.

Tabel 15. Pagu Anggaran DIPA 005.01 sampai Bulan Desember Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

Jenis Belanja	Pagu (Rp)
Belanja Pegawai	3,861,241,000
Belanja Barang	1.940.510.000
Belanja Modal	1.088.433.000
Total	6.890.184.000

- ❖ Pagu Anggaran DIPA 05 PTUN Jayapura Tahun 2023 sampai dengan bulan Desember 2023

Tabel 16. Pagu Anggaran DIPA 005.05 sampai Bulan Desember Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

Klasifikasi RO	Pagu (Rp)
Pelaksanaan Pengamanan Sidang	12.000.000
Pos Bantuan Hukum	32.900.000
Prodeo	1.400.000
Total	46.300.000

b. Realisasi Anggaran sampai dengan bulan Desember 2023

Laporan Realisasi Anggaran Dipa 005.01 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berdasarkan pos belanja:

Tabel 17. Realisasi Anggaran DIPA 005.01 Bulan Desember Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	BELANJA	DIPA (005.01)	REALISASI		SISA
			BULAN INI	S/D BLN INI	
1	Pegawai	3.861.241.000	259.290.996	3.561.933.426	299.307.574
2	Barang	1.937.214.000	174.176.708	1.886.486.283	50.72.717
3	Barang Non Operasional	3.296.000	0	2.980.000	316.000
4	Modal	1.088.433.000	496.940.210	1.083.904.210	4.528.790

Laporan Realisasi Anggaran Dipa 005.05 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berdasarkan pos belanja:

Tabel 18. Realisasi Anggaran DIPA 005.05 Bulan Desember Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	BELANJA	DIPA (005.05)	REALISASI		SISA
			BULAN INI	S/D BLN INI	
1	Pegawai	-	-	-	-
2	Barang	46.300.000	6.800.000	44.856.700	1.443.300
3	Modal	-	-	-	-

Rincian laporan realisasi anggaran manual dapat dilihat pada tabel lampiran.

1) Laporan PNBPNB

Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode bulan Desember Tahun 2023 secara umum sebagai berikut:

Tabel 19. Realisasi Penerimaan PNBPNB Bulan Desember Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO.	AKUN	JENIS PENDAPATAN	BLN INI	SD BLN INI
1	425131	Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	0	27.153.362
2	425232	Uang Meja (Leges)	130.000	1.600.000
3	425233	Ongkos Perkara	130.000	3.270.000
4	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	396.000	15.948.500
		Total	656.000	47.971.862

c. Keadaan Sarana dan Prasarana

Gedung kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berdiri diatas tanah seluas 3500 m2 dengan rincian luasan gedung 1444 m2, halaman gedung 2780 m2 dan pagar 222 m2. Rumah dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terdiri atas:

Tabel 20. Data Rumah Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	TYPE	TAHUN	LUAS TANAH	LUAS BANGUNAN
1	B	1992	700 m2	200 m2
2	B	1992	700 m2	150 m2
3	C	1992	1100 m2	120 m2
4	C	1992	1100 m2	120 m2
5	C	1992	1100 m2	120 m2
6	C	1992	1100 m2	120 m2

Peruntukan rumah dinas berdasarkan Surat Keputusan Penghunian Rumah Dinas adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Data Peruntukan Rumah Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	TYPE	LUAS TANAH	NO.SK	PENGGUNA	JABATAN
1	B	700 M2	W8-TUN3/70/PL.01/II/2023	Jusak Sindar, S.H	Ketua
2	B	700 M2	W8-TUN3/839/PL.01/VIII/2023	Merna Cinthia, S.H., M.H	Wakil ketua
3	C	1100 M2	W8-TUN3/720/PL.01/VII/2023	Ratna Jaya, S.H	Hakim
4	C	1100 M2	W8-TUN3/697/PL.01/VI/2023	Donny Poja, S.H	Hakim

Data kendaraan Roda Dua dan Roda Empat Kendaraan dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terdiri atas.

Tabel 22. Data Kendaraan Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	NAMA ASET	TAHUN	NO. PLAT	KONDISI	N0.SK	PENGGUNA	JABATAN	KET
1	Toyota Innova	2012	PA 60	Baik	W8-TUN3/387/PL.06/II /2023	JUSAK SINDAR, S.H	KETUA	
2	Toyota Vios	2006	PA 1988 DZ	Baik	W8-TUN3/504/PL.06/II /2023	MERNA CINTHIA, S.H., M.H	WAKIL KETUA	
3	Toyota Innova	2011	PA 1810 DZ	Baik	W8-TUN3/82/PL.06/II/2023	FEFI YANTI THOMAS, SE	SEKRETARIS	

4	Toyota Kijang KF 71 SPR	2003	PA 1689 DZ	Baik	W8-TUN3/ 88/PL.06/II/2023	SUYADI, SH	PANITERA	
5	Toyota Kijang Super	1993	PA 1697 DZ	Baik	W8-TUN3/ 86/PL.06/II/2023	DAVID.ALIK MITTING, SH	PANITERA PENGGANTI	
6	Honda	2011	PA 4289 DZ	Baik	W8-TUN3/ 905/PL.06/VI/2023	MEICE TJANDRA, S.H.,M.H	JURU SITA PENGGANTI	
7	Honda	2009	DS 6219 AF	-	-	-	-	TGR
8	Honda	2011	PA 4396 DZ	Baik	W8-TUN3/ 1140/PL.06/XI/202 3	DAVID.ALIK MITTING, SH	PANITERA PENGGANTI	
9	Honda	2008	PA 4517 DZ	Baik	W8-TUN3/ 100/PL.06/II/2023	DEDY W. NUGRAHA, A.Md	Pengelola BMN	PENGELOLA KEUANGAN
10	Honda	2008	DS 4301 DZ	Baik	W8-TUN3/ 92/PL.06/II/2023	MARTA DANGKUNG	KASUB.KEPG & ORTALA	
11	Honda	2008	PA 4743 DZ	Baik	W8-TUN3/ 98/PL.06/II/2023	RONALD RINALDI WAIRO, S.Kom	PRANATA KOMPUTER	
12	Honda	2005	PA 4732 DZ	Baik	W8-TUN3/ 90/PL.06/II/2023	PETRUS MITTING, SH	PANITERA PENGGANTI	
13	Honda	2009	PA 4658 DZ	Baik	W8-TUN3/ 108/PL.06/II/2023	KOMARUDIN, SH	PANITERA PENGGANTI	
14	Honda	2009	PA 4372 DZ	Baik	W8-TUN3/ 104/PL.06/II/2023	ELIZABETH KAIKATUY, SH	PANITERA PENGGANTI	
15	Honda	2005	PA 4290 DZ	Baik	W8-TUN3/ 110/PL.06/II/2023	CHRISTINA.M.Y. ROHROHMANA, S.H	ANALIS PERKARA PERADILAN	BENDAHARA PENERIMAAN
16	Honda	2007	PA 4518 DZ	Baik	W8-TUN3/ 94/PL.06/II/2023	ADE RUDIANTO. A.Md	PANITERA MUDA PERKARA	
17	Honda	2011	PA 4132 DZ	Baik	W8-TUN3/ 102/PL.06/II/2023	EFRAIM Y. PATTY	PANITERA PENGGANTI	
18	Honda	2007	PA 4519 DZ	Baik	W8-TUN3/ 96/PL.06/II/2023	JERIKA W. RISAKOTTA, S.H.	PANITERA MUDA HUKUM	
19	Honda	2007	PA 3473 DZ	Baik	W8-TUN3/ 106/PL.06/II/2023	RAFIKA. S.Pt	KASUB PTIP	

Data Ruangan dan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terdiri atas:

Tabel 23. Keadaan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	NAMA BARANG MILIK NEGARA	STATUS			Keterangan
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	2	-	-	
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	-	-	
3	Sedan	1	-	-	
4	Mini Bus	3	-	1	
5	Sepeda Motor	13	-	2	
6	Kursi Roda	1	-	-	
7	Cermin	2	-	3	
8	Rak-rak Penyimpan	14	1	3	
9	Lemari Besi	3	-	7	
10	Lemari Kayu	30	6	8	
11	Brankas	2	-	-	
12	CCTV	1	-	-	
13	Papan Visual/Papan Nama	6	-	11	
14	White Board	1	-	1	
15	LCD Proyektor	1	-	-	
16	Alat Kantor Lainnya	1	-	3	
17	Meja Kerja Kayu	57	14	50	
18	Kursi Besi	29	4	44	
19	Kursi Kayu	20	31	41	
20	Sice	5	3	12	
21	Bangku Panjang Kayu	20	7	7	
22	Sketsel	2	-	-	
23	Kursi Fiber Glass	23	33	14	
24	AC Split	21	-	15	
25	Mixer	2	-	1	
26	Televisi	3	-	6	
27	Amplifire	2	1	-	
28	Loudspeaker	6	-	8	
29	Tiang Bendera	4	1	1	
30	Kaca Hias	1	-	1	
31	Palu Sidang	2	-	1	
32	Lambang Instansi	1	-	-	
33	Handycam	1	-	-	Dalam proses penghapusan
34	Audio Mixing Console	1	-	-	
35	Microphone/Wireless Mic	6	-	2	
36	UPS	7	-	-	
37	Microphone cable	11	-	-	
38	Camera Conference	1	-	-	
39	Genset	1	-	-	
40	Walker Polding	2	-	-	
41	Komputer jaringan lainnya	3	-	-	
42	PC	25	4	13	
43	Laptop	8			
44	Notebook	9	6	5	
45	Printer	6	6	16	
46	scanner	1	-	2	

47	server	1	-	1	
48	router	1	-	1	
49	Rak server	1	-	-	
50	Bangunan Gedung kantor permanen	1	-	-	
51	Rumah negara golongan I tipe B permanen	2	-	-	
52	Rumah negara golongan I tipe C permanen	4	-	-	
53	Pagar permanen	1	-	-	
54	Referensi	18	-	-	
55	Papan pengumuman	-	1	-	
56	Meja komputer	-	1	3	
57	Meja Resepsionis	-	1	1	
58	Compact disk player	-	1	-	
59	Alat tenis meja	-	1	1	Dalam proses penghapusan
60	Lemari Penyimpan	-	-	3	Dalam proses penghapusan
61	Mesin ketik manual standar	-	-	3	Dalam proses penghapusan
62	Mesin Ketik manual Langewagon	-	-	2	Dalam proses penghapusan
63	Rak kayu	-	-	1	Dalam proses penghapusan
64	Filling Cabinet besi	-	-	12	Dalam proses penghapusan
65	Tempat tidur besi	-	-	1	Dalam proses penghapusan
66	Tempat tidur kayu	-	-	3	Dalam proses penghapusan
67	Meja telepon	-	-	1	Dalam proses penghapusan
68	Kasur/spring bed	-	-	7	Dalam proses penghapusan
69	Meja makan kayu	-	-	1	Dalam proses penghapusan
70	Perkakas kantor lainnya			1	Dalam proses penghapusan
71	Pot bunga	-	-	6	Dalam proses penghapusan
72	Jam elektronik	-	-	10	Dalam proses penghapusan
73	Lemari es	-	-	2	Dalam proses penghapusan
74	Kipas angin	-	-	18	Dalam proses penghapusan
75	Equalizer	-	-	1	Dalam proses penghapusan
76	Sound System	-	-	1	Dalam proses penghapusan
77	Microphone	-	-	2	Dalam proses penghapusan
78	Microphone table stand	-	-	6	Dalam proses penghapusan
79	Stabilisator	-	-	3	Dalam proses penghapusan
80	Lambang Garuda Indonesia	-	-	3	Dalam proses penghapusan

81	Gambar Presiden/Wakil Presiden	-	-	1	Dalam proses penghapusan
82	Pataka	-	-	5	Dalam proses penghapusan
83	Dispenser	-	-	5	Dalam proses penghapusan
84	Mimbar/Podium	-	-	2	Dalam proses penghapusan
85	Gordyn/kray	-	-	9	Dalam proses penghapusan
86	Kabel roll	-	-	9	Dalam proses penghapusan
87	Asbak tinggi	-	-	3	Dalam proses penghapusan
88	Keset kaki	-	-	6	Dalam proses penghapusan
89	Kabel	-	-	2	Dalam proses penghapusan
90	Camera digital	-	-	1	Dalam proses penghapusan
91	Key telephone	-	-	5	Dalam proses penghapusan
92	Pesawat telephone	-	-	12	Dalam proses penghapusan
93	Telephone mobile	-	-	2	Dalam proses penghapusan
94	Faximili	-	-	3	Dalam proses penghapusan
95	Antenna SHF Transportable	-	-	2	Dalam proses penghapusan
96	Peralatan antenna SHF	-	-	2	Dalam proses penghapusan
97	All band receiver	-	-	1	Dalam proses penghapusan
98	Alat pemadam kebakaran	-	-	1	Dalam proses penghapusan
99	Generator	-	-	2	Dalam proses penghapusan
100	Stabilizer	-	-	4	Dalam proses penghapusan
101	Internet	-	-	1	Dalam proses penghapusan
102	Hard disk	-	-	3	Dalam proses penghapusan
103	Rambu papan tambahan	-	-	1	Dalam proses penghapusan
104	Monografi	-	-	2	Dalam proses penghapusan
105	Software computer	-	-	1	Dalam proses penghapusan

1) Penetapan Status dan Penggunaan BMN

Mengacu pada PMK Nomor: 246/PMK.06/2014 tentang penetapan status BMN dan Perma Nomor: 1 Tahun 2017 tentang penetapan status BMN serta berdasar usulan penetapan status BMN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: W4-TUN4/928/um.03.10/1x/2017 tanggal 04 Februari 2017 SK

penetapan status BMN atas Tanah dan Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura belum ada.

2) Pengalihan Status dan Penghapusan BMN

Pengalihan status BMN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah diusulkan untuk penghapusan BMN yang statusnya dalam keadaan rusak berat. Sedangkan BMN yang hilang pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah diselesaikan tuntutan ganti rugi (TGR).

d. Tata Persuratan

Mengacu pada ketentuan dalam Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Surat Masuk dan Surat Keluar kedinasan melalui satu pintu pengelolaan di bagian Umum dan Keuangan.

Tabel 24. Data Surat Masuk dan Surat Keluar Periode Desember Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	BAGIAN	JUMLAH	
		SURAT MASUK	SURAT KELUAR
1	Umum & Keuangan.	8	61
2	Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana.	11	46
3	Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan.	0	14
4	Kepaniteraan Perkara.	4	12
5	Kepaniteraan Hukum.	2	6

1) Pengelolaan Perpustakaan

Tanggung jawab pengelolaan perpustakaan dibawah kendali Kasubbag Umum dan Keuangan dan sebagai petugas Kepustakaan (pustakawan) belum ditunjuk Penunjukan petugas perpustakaan belum dituangkan kedalam Surat Keputusan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jumlah koleksi buku yang tersimpan di perpustakaan sampai dengan bulan Desember 2023 berjumlah 1200 (seribu dua ratus) buku. Pengelolaan database perpustakaan belum dilakukan ke dalam buku register pustaka. Pengelolaan database secara elektronik belum dilakukan melalui aplikasi **SLIM Senayan**, Sebagian buku telah dilakukan pengkodean atau labelisasi dan pemberian index pada buku koleksi.

2) Sarana dan Prasarana Kearsipan dan Kepustakaan

Lemari Perpustakaan dua buah, dan meja satu buah.

3) Pengelolaan Aset dan BMN

2) Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berjumlah 25 Orang yang terdiri dari:

Tabel 25. Sumber Daya Manusia Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1.	Ketua	Jusak Sindar, S.H	
2.	Wakil Ketua	Merna Cinthia, S.H., M.H	
3.	Hakim	Yusuf Klemen, SH	
4.	Hakim	Donny Poja, S.H.	
5.	Hakim	Ratna Jaya, S.H	
6.	Panitera	Suyadi, S.H	
7.	Sekretaris	Fefi Yanti Thomas, SE	
8.	Panitera Muda Perkara	Ade Rudianto, A.Md	
9.	Panitera Muda Hukum	Jerika Wihelmina Risakotta, S.H., M.H	
10.	Panitera Pengganti	Petrus Mitting, S.H	
11.	Panitera Pengganti	David Alik Mitting, S.H	
12.	Panitera pengganti	Elizabeth Kaikatuy, S.H	
13.	Kasub Bag. Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	Rafika, S.Pt	
14.	Panitera Pengganti	Komarudin, S.H	
15.	Panitera Pengganti	Efraim Yoseph Patty, S.H., M.H	
16.	Juru Sita Pengganti	Meice Tjandra, S.E.,S.H., M.H	
17.	Staf Panitera Muda Hukum	Dr. Petrus Paulus Maturbongs, S.H., M.H.	Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Jayapura
18.	Kasub Bag. Umum dan Keuangan	Apriani Samuel, S.Psi	Bendahara Pengeluaran
19.	Pengelola Keuangan Perkara	Yeyen. M. F. Suli, A.Md. Kom	
20.	Jurusita Pengganti	Christina M. Y. Rohrohmana, S.H	
21.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom	
22.	Pengelola Barang Milik Negara	Dedy Widya Nugraha, A.Md	
23.	Analisis Perkara Peradilan	Lowrenszya Siagian, S.H	
24.	Analisis Perkara Peradilan	Fitri Yulyanti, S.H	Plt. Kasub Kepegawaian & Ortala

Sedangkan berdasarkan pada Pangkat/Golongan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah sebagai berikut:

Tabel 26. Pangkat/Golongan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	JABATAN	NAMA	GOL
1	Ketua	Jusak Sindar, S.H	IV/b
2	Wakil Ketua	Merna Cinthia, S.H., M.H	IV/b
3	Hakim	Yusuf Klemen, SH	IV/b
4	Hakim	Ratna Jaya, S.H	IV/a
5	Hakim	Donny Poja, S.H.	III/d
6	Panitera	Suyadi, S.H	IV/a
7	Sekretaris	Fefi Yanti Thomas, SE	IV/a
8	Panitera Muda Perkara	Ade Rudianto, A.Md	III/d
9	Panitera Muda Hukum	Jerika Wihelmina Risakotta, S.H., M.H	III/d
10	Panitera Pengganti	Petrus Mitting, S.H	III/d
11	Panitera Pengganti	David Alik Mitting, S.H	III/b
12	Panitera pengganti	Elizabeth Kaikatuy, S.H	III/b
13	Kasub Bag. Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	Rafika, S.Pt	III/d
14	Panitera Pengganti	Komarudin, S.H	III/b
15	Panitera Pengganti	Efraim Yoseph Patty, S.H., M.H	III/b
16	Juru Sita Pengganti	Meice Tjandra, S.E., S.H., S.H	III/c
17	Staf Panitera Muda Hukum	Dr. Petrus Paulus Maturbongs, S.H., M.H.	IV/a
18	Analisis SDM Aparatur	Apriani Samuel, S.Psi	III/b
19	Analisis Perkara Peradilan	Christina M. Y. Rohrohmana, S.H	III/b
20	Pranata Komputer Ahli Pertama	Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom	III/a
21	Analisis Perkara Peradilan	Lowrenszya Siagian, S.H	III/a
22	Analisis Perkara Peradilan	Fitri Yulyanti, S.H	III/c
23	Pengelola Keuangan Perkara	Yeyen M. F. Suli., A.Md.Kom	II/d
24	Pengelola Barang Milik Negara	Dedy Widya Nugraha, A.Md	III/a

1. Jabatan fungsional yang diperbantukan pada jabatan administrasi

Jabatan fungsional yang diperbantukan pada jabatan administrasi pada Pengadilan Tata usaha Negara Jayapura.

Tabel 27. Jabatan fungsional yang diperbantukan pada jabatan administrasi lainnya

NO	NAMA	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN ADMINISTRASI LAINNYA
1	Komarudin, S.H	Panitera Pengganti.	Kasir
2	Christine M. Rohrohmana,S.H	Jurusita Pengganti	Petugas Meja I
3	Apriani Samuel, S.Psi	Kasub Umum dan Keuangan	Bendahara Pengeluaran
4	Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama.	Operator SAIBA
5	Dedy Widya Nugraha, A.Md.	Pengelola Barang Milik Negara	Pembuat Daftar Gaji BMN
6	Fitri Yulyanti, S.H	Analisis Perkara Peradilan	Plt. Kepegawaian dan Ortala

Tabel 28. Tenaga Honorer yang Diperbantukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	NAMA		PENEMPATAN	TUGAS SESUAI SK
1.	Billy Langoy.	:	diperbantukan di bagian Umum dan Keuangan.	Pengemudi
2.	Syane Ratag, S.E.	:	diperbantukan di bagian Umum dan keuangan.	Pramubakti
3.	Esti Sitinjak, S.Kom.	:	diperbantukan di bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana.	Pramubakti
4.	Heni M. Klemen, S.H.	:	diperbantukan di bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana.	Pramubakti
5.	Rahmat, S.H.	:	diperbantukan di bagian Panitera Muda Perkara.	Pramubakti
6.	Izak Pattipeilohy.	:	diperbantukan di bagian Umum dan keuangan.	Satpam
7.	Ridwan Kristiawan, S.H.	:	diperbantukan di bagian Panitera Muda Perkara.	Pengemudi
8.	Jhon Lewakabessy, S.T.	:	diperbantukan di bagian Panitera Muda Hukum.	Satpam
9.	Maikel P. kelyanin, S.T.	:	diperbantukan di bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan pelaporan.	Pramubakti
10.	Hose Pondan Mangallo, S.E	:	diperbantukan di bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan pelaporan.	Pramubakti

2. Promosi, Mutasi dan Pensiun

Tidak terdapat pejabat dan atau pegawai yang pada bulan Desember mendapat promosi/mutasi dan tidak terdapat pejabat atau pegawai yang pensiun.

Tidak terdapat pejabat dan atau pegawai yang pada bulan Desember ini pensiun.

3. Diklat/Bimtek (SDM Teknik / Non Teknis)

Tidak terdapat pejabat dan atau pegawai yang pada bulan Desember mengikuti Diklat maupun Bimtek.

4. Pengelolaan Database SAPK dan SIKEP

Database SAPK dikelola oleh Christina M. Y. Rohrohmana, S.H sebagai administrator pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Pemutakhiran database SAPK dilakukan setiap ada perubahan data pegawai terkait dengan kenaikan pangkat, promosi/mutasi/pensiun, serta perubahan data identitas pegawai. Pada aplikasi Sikep Mahkamah Agung, pengelolaan database dilakukan oleh Fefi Yanti Thomas, S.E sebagai user administrator satuan kerja. Hasil rekapitulasi kelengkapan database pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada aplikasi SIKEP adalah sebagai berikut:

Tabel 29. Rekapitulasi Kelengkapan Database Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	NAMA PEGAWAI	STATUS	KETERANGAN
1	Jusak Sindar, S.H	Lengkap	-
2	Merna Cinthia, S.H., M.H	Lengkap	-
3	Yusuf Klemen, SH	Lengkap	-
4	Donny Poja, S.H.	Lengkap	-
5	Ratna Jaya, S.H	Lengkap	-
6	Suyadi, S.H.	Lengkap	-
7	Dr. Petrus Paulus Maturbongs, S.H., M.H.	Lengkap	-
8	Ade Rudianto, A.Md	Lengkap	-
9	Jerika Wilhelmina. Risakotta, S.H., M.H	Lengkap	-
10	Fefi Yanti Thomas, SE	Lengkap	-
11	Petrus Mitting, SH	Lengkap	-
12	Elizabeth Kaikatuy, SH	Lengkap	-
13	Rafika, S.Pt	Lengkap	-
14	David Alik Mitting, SH	Lengkap	-
15	Komarudin, SH	Lengkap	-
16	Meice Tjandra, S.E.,S.H.,M.H	Lengkap	-

17	Efraim Yoseph Patty, S.H., M.H	Lengkap	-
18	Christina M. Y. Rohrohmana, SH	Lengkap	-
19	Apriani Samuel, S.Psi	Lengkap	-
20	Yeyen M. F. Suli, A.Md.Kom	Lengkap	-
21	Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom	Lengkap	-
22	Dedy Widya Nugraha, A.Md	Lengkap	-
23	Lowrenszya Siagian, S.H	Lengkap	-
24	Fitri Yulyanti, S.H	Lengkap	-

3) Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

3.1. Revisi DIPA/POK

Pada bulan Desember Tahun 2023 dilakukan revisi DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Kode Satker 539138 tingkat DJA Eselon 1.

3.2. Pengelolaan Website dan Jaringan

Pembuatan website Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sudah mengacu pada ketentuan dalam surat Ketua Mahkamah Agung SK MA 1-144 tahun 2011 yang merupakan penyempurnaan dari SK 144/2007 mengenai dasar pembuatan situs Mahkamah Agung. Alamat website Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dapat diakses di ptun-jayapura.go.id.

Pengelolaan website sudah sepenuhnya dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura termasuk akun Hosting sudah atas nama Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tanggung jawab pengelolaan ada pada Kasubag PTIP sesuai SK Nomor W4-TUN4/55/OT.01.3/1/2023 Pelaksana redaktur dan editor adalah Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom. Jaringan internet menggunakan vendor pihak ketiga yaitu Telkom Indonesia dengan kecepatan 310 Mbps dengan pengaturan 1 acces point 20 Mbps termasuk untuk kepentingan pelaksanaan SIPP sebesar 10 Mbps.

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dengan luasnya wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura maka dituntut adanya pelayanan yang prima dan lebih baik terhadap masyarakat pencari keadilan. Untuk itu sangat diperlukan terpenuhinya sarana dan prasarana berupa pagar kantor yang belum diselesaikan serta Pelatihan sumber daya manusia ditingkatkan untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman lebih baik kedepan.

B. Rekomendasi

Tertibnya Pelaksanaan Administrasi serta jalannya sistem peradilan yang baik hal ini tidak terlepas dari terpenuhinya kualitas dan kuantitas sumber daya manusianya yaitu adanya tertib disiplin kerja sesuai instruksi Ketua Mahkamah Agung R.I.

Maka sehubungan hal tersebut diatas maka diusulkan sebagai berikut:

1. Diharapkan segera adanya pengisian Jabatan Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala.
2. Diharapkan realisasi penambahan pegawai sebanyak 5 (lima) orang, mengingat tenaga staf pada masing-masing Sub Bagian sangat kurang bahkan tidak ada pelaksana pada bagian Kesekretariatan masing-masing bagian.
3. Diharapkan Pelatihan Aplikasi Perkantoran untuk Operator atau Admin.
4. Penambahan Anggaran DIPA tahun berikutnya pada layanan sarana internal (Belanja Modal), khususnya pembangunan pagar tahap kedua yang dipandang perlu untuk segera direalisasikan mengingat tinggi pagar yang ada sekarang belum memadai untuk keamanan kantor dan Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

Jayapura, 10 Januari 2024

KETUA
JUSAK SINDAR

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran Manual DIPA 005.01

Lampiran 2 : Laporan Realisasi Anggaran Manual DIPA 005.05

Lampiran 3 : Laporan Realisasi PNBPA DIPA 005.01

Lampiran 4 : Laporan Realisasi PNBPA DIPA 005.05

Lampiran 6 : Laporan Perkara (LI – T1, LI – T2, LI – T3, LI – T4, LI – T5, LI – T6)

LAMPIRAN 1
LAPORAN REALISASI ANGGARAN MANUAL DIPA 005.01

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BULAN DESEMBER 2023

SATKER/ KODE SATKER : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA (539138)
PROPINSI : PAPUA (2500)
BAGIAN ANGGARAN : MAHKAMAH AGUNG (005)
UNIT ORGANISASI : BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01)
NO. DIPAI/ TGL DIPAI : SP DIPA- 005.01.2.539138/2023 TANGGAL 30 NOVEMBER 2022
NO. DIPAI/ TGL DIPAI : SP DIPA- 005.01.2.539138/2023 REVISI KE-1 TANGGAL 14 APRIL 2023, SP DIPA- 005.01.2.539138/2023 REVISI KE-2 TANGGAL 12 JULI 2023, SP DIPA- 005.01.2.539138/2023 REVISI KE-3
NO. DIPAI/ TGL DIPAI REVISI : SP DIPA- 005.01.2.539138/2023 REVISI KE-4 TANGGAL 23 OKTOBER 2023, SP DIPA- 005.01.2.539138/2023 REVISI KE-5 TANGGAL 22 NOVEMBER 2023
TANGGAL 01 SEPTEMBER 2023, SP DIPA- 005.01.2.539138/2023 REVISI KE-6 TANGGAL 22 NOVEMBER 2023

NO	KODE	JENIS BELANJA/MAK	PAGU DIPA	REALISASI S/D BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		SISA DANA S/D BULAN INI		KET
				TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8=(7/4)	9=(8+7)	10=(9/4)	11=(4-9)	12=(11/4)	13
1	005.01.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN										
	1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi										
	1066.EBA	LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL										
	1066.EBA.962	Layanan Umum										
	061	Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah										
	A. 521262	Pengadaan Inventaris CPNS (Meja dan Kursi)	2.296.000	1.980.000	86,24%	0	0,00%	1.980.000	86,24%	316.000	13,76%	
	061	Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah										
	B. 521262	Alat bantu jalan	1.000.000	1.000.000	100,00%	0	0,00%	1.000.000	100,00%	0	0,00%	
			3.296.000	2.980.000	90,41%	0	0,00%	2.980.000	90,41%	316.000	9,59%	
		JUMLAH KEGIATAN 1066.EAC.003										
	1066.EBA.964	LAYANAN PERKANTORAN										
	001	Gaji dan Tunjangan										
	A. 511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.246.455.000	1.112.896.440	89,28%	87.200.400	7,00%	1.200.096.840	96,28%	46.358.160	3,72%	
	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	23.000	19.012	82,66%	1.387	6,07%	20.409	88,73%	2.591	11,27%	
	511121	Belanja Tunj. Suami/Isteri PNS	98.032.000	78.839.790	79,71%	5.869.180	5,93%	84.808.970	85,64%	14.223.030	14,36%	
	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	30.375.000	25.628.284	84,37%	2.070.738	6,82%	27.699.022	91,19%	2.675.978	8,81%	
	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	32.760.000	27.180.000	82,97%	2.340.000	7,14%	29.520.000	90,11%	3.240.000	9,89%	
	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.485.850.000	1.285.695.050	86,53%	96.790.000	6,51%	1.382.485.050	93,04%	103.364.950	6,96%	
	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	258.378.000	210.277.374	81,38%	14.450.981	5,59%	224.728.355	86,98%	33.649.645	13,02%	
	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	73.579.000	61.122.480	83,07%	4.707.300	6,40%	66.829.780	89,47%	7.749.220	10,53%	
	511129	Belanja Uang Makan PNS	228.664.000	162.074.000	70,88%	16.451.000	7,19%	178.525.000	78,07%	50.139.000	21,93%	
	511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	209.970.000	179.695.000	85,58%	16.485.000	7,85%	196.180.000	93,43%	13.790.000	6,57%	
	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	19.355.000	15.115.000	78,09%	925.000	4,78%	16.040.000	82,87%	3.315.000	17,13%	
	511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	176.800.000	144.000.000	81,45%	12.000.000	6,79%	156.000.000	88,24%	20.800.000	11,76%	
		JUMLAH KEGIATAN 1066.EAA.001	3.861.241.000	3.302.642.430	85,53%	259.290.996	6,72%	3.561.933.426	92,25%	299.307.574	7,75%	
	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor										
	A. 521111	Belanja Keperluan Perkantoran	602.422.000	486.611.070	80,78%	92.787.200	15,40%	589.398.270	97,84%	13.023.730	2,16%	
	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	73.147.000	71.320.172	97,50%	1.102.000	1,51%	72.422.172	99,01%	724.828	0,99%	
	B. 521111	Belanja Keperluan Perkantoran (Video Conference - Internet)	226.444.000	205.942.610	90,95%	12.810.000	5,66%	218.752.610	96,80%	7.691.390	3,40%	
	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	18.000.000	15.078.040	83,77%	2.336.000	12,98%	17.414.040	96,74%	585.960	3,26%	

NO	KODE	JENIS BELANJA/MAK	PAGU DIPA	REALISASI S/D BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		SISA DANA S/D BULAN INI		KET	
				TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%		
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8=(7/4)	9=(5+7)	10=(9/4)	11=(4/9)	12=(11/4)	13	
	522112	Belanja Langganan Telepon	4.524.000	4.054.320	89,62%	344.303	7,61%	4.398.623	97,23%	125.377	2,77%		
	522113	Belanja Langganan Air	1.104.000	628.000	56,88%	56.000	5,07%	684.000	61,96%	420.000	38,04%		
	522141	Belanja Sewa (Web Hosting)	5.100.000	5.016.173	98,36%		0,00%	5.016.173	98,36%	83.827	1,64%		
	C. 523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	526.093.000	523.136.000	99,44%	420.000	0,08%	523.556.000	99,52%	2.537.000	0,48%		
	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	56.020.000	55.960.257	99,89%		0,00%	55.960.257	99,89%	59.743	0,11%		
	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	239.724.000	173.954.299	72,56%	49.462.205	20,63%	223.416.504	93,20%	16.307.496	6,80%		
	D. 521111	Belanja Keperluan Perkantoran (Pakaian Dinas)	34.152.000	34.000.000	99,55%		0,00%	34.000.000	99,55%	152.000	0,46%		
	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	80.604.000	58.689.000	72,81%	14.859.000	18,43%	73.548.000	91,25%	7.056.000	8,75%		
	H. 524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	68.880.000	67.919.634	97,19%		0,00%	67.919.634	97,19%	1.960.366	2,81%		
		JUMLAH KEGIATAN 1066.EJA.002	1.937.214.000	1.712.309.575	88,39%	174.176.708	8,99%	1.886.486.263	97,38%	50.727.717	2,62%		
	1071	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG											
	1071.EBB.991	LAYANAN SARANA INTERNAL											
	053	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran											
	A. 532111	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin (Kursi Roda)	4.000.000	4.000.000	100,00%		0,00%	4.000.000	100,00%	0	0,00%		
	B. 532111	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin (Meibelatir)	50.000.000	0	0,00%	49.851.210	99,70%	49.851.210	99,70%	148.790	0,30%		
	1071.EBB.971	LAYANAN PRASARANA INTERNAL											
	051	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan											
	A. 533121	Pengadaan Prasarana Disabilitas (Jalur/Toilet Disabilitas)	34.433.000	34.433.000	100,00%		0,00%	34.433.000	100,00%	0	0,00%		
	B. 533111	Pagar Kantor	1.000.000.000	548.531.000	54,85%	447.059.000	44,71%	995.620.000	99,56%	4.380.000	0,44%		
		JUMLAH KEGIATAN 1071.EAD.001	1.088.433.000	588.964.000	53,93%	496.940.210	45,66%	1.083.904.210	99,58%	4.528.790	0,42%		
		JUMLAH KESELURUHAN	6.890.184.000	5.604.896.005	81,35%	930.407.914	13,50%	6.535.303.919	94,85%	354.880.081	5,15%		

Jumlah Anggaran	6.890.184.000	Percentase
Realisasi Anggaran	6.535.303.919	94,85%
Sisa Anggaran	354.880.081	5,15%



LAMPIRAN 2
LAPORAN REALISASI ANGGARAN MANUAL DIPA 005.05

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BULAN DESEMBER 2023

SATKER/ KODE SATKER : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA (539139)
PROPINSI : PAPUA (2600)
BAGIAN ANGGARAN : MAHKAMAH AGUNG (005)
UNIT ORGANISASI : DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TUN (05)
NO. DIPA/ TGL DIPA : SP DIPA- 005.05.2.539139/2023 TANGGAL 30 NOVEMBER 2022
NO. DIPA/ TGL DIPA REVISI : SP DIPA- 005.01.2.539138/2023 REVISI KE-1 TANGGAL 14 APRIL 2023, SP DIPA- 005.01.2.539138/2023 REVISI KE-2 TANGGAL 12 JULI 2023

NO	KODE	JENIS BELANJAMA	PAGU DIPA	REALISASI S/D BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		SISA DANA S/D BULAN INI		KET
				TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8=(7/4)	9=(5+7)	10=(9/4)	11=(4-9)	12=(11/4)	13
	005.05.BF	PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM										
	1059	PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN TATA USAHA NEGARA										
	1059.AEA	Koordinasi										
I	1059.AEA.003	Dukungan Penyelidikan Perkara										
	051	Pelaksanaan Pengamanan Sidang										
	A. 521211	Belanja Bahan (Konsumsi Pengamanan Sidang)	12,000,000	10,920,000	91.00%	1,080,000	9.00%	12,000,000	100.00%	0	0.00%	
		JUMLAH KEGIATAN 1059.001	12,000,000	10,920,000	91.00%	1,080,000	9.00%	12,000,000	100.00%	0	0.00%	
II	1059.QBA.001	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara										
	051	Pos Bantuan Hukum										
	A	Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Hukum										
	A. 521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (ATK Posbakum)	4,100,000	3,136,700	76.50%	920,000	22.44%	4,056,700	98.94%	43,300	1.06%	
	A. 522131	Belanja Jasa Konsultansi Hukum	28,800,000	24,000,000	83.33%	4,800,000	16.67%	28,800,000	100.00%	0	0.00%	
		JUMLAH KEGIATAN 1059.001	32,900,000	27,136,700	82.48%	5,720,000	17.39%	32,856,700	99.87%	43,300	0.13%	

NO	KODE	JENIS BELANJA/MAK	PAGU DIPA	REALISASI S/D BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		SISA DANA S/D BULAN INI		KET
				TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8=(7/4)	9=(5+7)	10=(9/4)	11=(4-9)	12=(11/4)	13
III	1059.QCA.001	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang di Selesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara										
	051	Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara										
	A. 521211	Penggunaan dan Perijinan Berkas Perkara	400,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	400,000	100.00%	
	521811	Alat Tulis Kantor	100,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	100,000	100.00%	
	522151	Honorarium Untuk Ahli Penerjemah/Juru Bahasa untuk Perkara Tertentu	400,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	400,000	100.00%	
	524113	Pengiriman Pemberitahuan/Panggilan	500,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	500,000	100.00%	
		JUMLAH KEGIATAN 1059.J02	1,400,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1,400,000	100.00%	
		JUMLAH KESELURUHAN	46,300,000	38,056,700	82.20%	6,800,000	14.69%	44,856,700	96.88%	1,443,300	3.12%	

Jumlah Anggaran	46,300,000	Percentage
Realisasi Anggaran	44,856,700	96.88%
Sisa Anggaran	1,443,300	3.12%

Jayapura, 03 Januari 2024

Kepala Pengguna Anggaran

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura



KEPTANTI THOMAS, SE

NIP. 19790310 200604 2 002

LAMPIRAN 3
LAPORAN REALISASI PNBP DIPA 005.01

TAHUN : 2023
BULAN : Desember
NOMOR / TANGGAL DIPA : SP DIPA-005.01.2.539138/2023 / 30-11-2022
DEPARTEMEN / LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
PROVINSI / KABUPATEN : Prop. Irian Jaya / Kota Jayapura
SATKER : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
KPPN : JAYAPURA

NO	MAP	URAIAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	VOLUME	TARIF	JUMLAH PENERIMAAN	JUMLAH DISETOR
1		Pendapatan dari Pemanfaatan BMN				
	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan				
		- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	19	-	Rp. 27.153.362	Rp. 25.005.800
JUMLAH I					Rp. 27.153.362	Rp. 25.005.800
JUMLAH I s/d I					Rp. 27.153.362	Rp. 25.005.800



Mengetahui
Sekretaris
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

Fefi Yanti Thomas, SE
NIP. 197903102006042002

Jayapura, 29 Desember 2023
Bendahara Penerimaan
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

CHRISTINA MEGAWATI YULIANA ROHROHMANA, S.H.
NIP. 198508172019032006

TAHUN : 2023
BULAN : Desember
NOMOR / TANGGAL DIPA : SP DIPA- 005.01.2.539138/2023 / 30-11-2022
DEPARTEMEN / LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
PROPINSI / KABUPATEN : Prop. Irian Jaya / Kota Jayapura
SATKER : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
KPPN : JAYAPURA

NO	MAP	URAIAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	TARGET	JUMLAH S/D BULAN YANG LALU	JUMLAH PENERIMAAN BULAN INI	JUMLAH PENERIMAAN S/D BULAN INI
1	Pendapatan dari Pemakaian BMN					
	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	Rp. 0	Rp. 27.153.362	Rp. 0	Rp. 27.153.362
		JUMLAH I	Rp. 0	Rp. 27.153.362	Rp. 0	Rp. 27.153.362
		JUMLAH I s/d I	Rp. 0	Rp. 27.153.362	Rp. 0	Rp. 27.153.362

Mengetahui
Sekretaris
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA


Fee Yanti Thomas, SE
NIP. 197903102006042002

Jayapura, 29 Desember 2023
Bendahara Penerimaan
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA


CHRISTINA MEGAWATI YULIANA ROHROHMANA, S.H.
NIP. 198508172019032006

LAMPIRAN 4

LAPORAN REALISASI PNBP DIPA 005.05

TAHUN : 2023
 BULAN : Desember
 NOMOR / TANGGAL DIPA : DIPA- 005.05.2.539139/2023 / 30-11-2022
 DEPARTEMEN / LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
 PROPINSI / KABUPATEN : Prop. Irian Jaya / Kota Jayapura
 SATKER : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
 KPPN : JAYAPURA

NO	MAP	URAIAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	VOLUME	TARIF	JUMLAH PENERIMAAN	JUMLAH DISETOR
1		Pendapatan Kejaksaan/Peradilan				
	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan				
		- Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	160	10	Rp. 1.600.000	Rp. 1.600.000
	425233	Pendapatan Ongkos Perkara				
		- Pendaftaran Permohonan PK dan Penerimaan Alasan PK dari Pemohon	2	200	Rp. 400.000	Rp. 400.000
		- Pendaftaran Gugatan/Permohonan	35	30	Rp. 1.050.000	Rp. 1.050.000
		- Pendaftaran Permohonan Eksekusi	2	10	Rp. 20.000	Rp. 20.000
		- Pendaftaran Permohonan Banding	20	50	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
		- Pendaftaran Permohonan Kasasi	16	50	Rp. 800.000	Rp. 800.000
	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya				
		- Surat Panggilan Pertama kepada Pihak Ketiga yang Berkepentingan	24	10	Rp. 240.000	Rp. 240.000
		- Permohonan Pengawasan Eksekusi	3	25	Rp. 75.000	Rp. 75.000
		- Pendaftaran Surat Kuasa/Kuasa Insidentil untuk Mewakili Pihak yang Berperkara di Pengadilan	110	10	Rp. 1.100.000	Rp. 1.100.000
		- Sisa Uang Panjar Perkara yang lebih dari 6 bulan tidak diambil oleh pihak ketiga (Sisa Uang Panjar Biaya	5	305	Rp. 4.348.000	Rp. 4.348.000
		- Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/ Penetapan Pengadilan	8,451	500	Rp. 4.225.500	Rp. 4.225.500
		- Penyerahan Akta Permohonan Kasasi	16	10	Rp. 160.000	Rp. 160.000
		- Surat Penyerahan Jawaban/ Tanggapan PK kepada Pemohon	8	10	Rp. 80.000	Rp. 80.000
		- Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Tergugat/ Termohon	4	10	Rp. 40.000	Rp. 40.000
		- Surat Penyerahan Memori Banding	34	10	Rp. 340.000	Rp. 340.000
		- Surat Panggilan Pertama kepada Penggugat/Pemohon	39	10	Rp. 390.000	Rp. 390.000
		- Surat Pemberitahuan Akta Kasasi	21	10	Rp. 210.000	Rp. 210.000
		- Akta/Surat Keterangan Asli yang Dibuat di Kepaniteraan di Luar Perkara	6	10	Rp. 60.000	Rp. 60.000
		- Redaksi Putusan/Penetapan	61	10	Rp. 610.000	Rp. 610.000
		- Surat Penyerahan Kontra Memori Kasasi	21	10	Rp. 210.000	Rp. 210.000
		- Penyerahan Akta Permohonan PK kepada Pemohon	2	10	Rp. 20.000	Rp. 20.000
		- Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Termohon PK	7	10	Rp. 70.000	Rp. 70.000
		- Surat Panggilan Pertama kepada Tergugat/Termohon	45	10	Rp. 450.000	Rp. 450.000
		- Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Pemohon Kasasi	13	10	Rp. 130.000	Rp. 130.000
		- Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding	25	10	Rp. 250.000	Rp. 250.000
		- Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Pemohon PK	3	10	Rp. 30.000	Rp. 30.000
		- Surat Pemberitahuan Akta PK dan Penyerahan Alasan PK kepada Termohon	6	10	Rp. 60.000	Rp. 60.000
		- Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Pembanding	18	10	Rp. 180.000	Rp. 180.000
		- Surat Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding	16	10	Rp. 160.000	Rp. 160.000
		- Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Termohon Kasasi	20	10	Rp. 200.000	Rp. 200.000
		- Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding	89	10	Rp. 890.000	Rp. 890.000
		- Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Penggugat/ Pemohon	1	10	Rp. 10.000	Rp. 10.000
		- Surat Penyerahan Memori Kasasi	21	10	Rp. 210.000	Rp. 210.000
		- Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Terbanding	31	10	Rp. 310.000	Rp. 310.000
		- Surat Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding	46	10	Rp. 460.000	Rp. 460.000
		- Surat Penyerahan Kontra Memori Banding	43	10	Rp. 430.000	Rp. 430.000
JUMLAH I					Rp. 20.818.500	Rp. 20.818.500
JUMLAH I s/d I					Rp. 20.818.500	Rp. 20.818.500



Mengetahui
 Sekretaris
 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

Penyanti Thomas, SE
 NIP. 197903102006042002

Jayapura, 29 Desember 2023
 Bendahara Penerimaan
 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

Handwritten signature of Christina Megawati Yuliana Rohrohmana, S.H.

CHRISTINA MEGAWATI YULIANA ROHROHMANA, S.H.
 NIP. 198508172019032006

TAHUN : 2023
BULAN : Desember
NOMOR / TANGGAL DIPA : DIPA- 005.05.2.539139/2023 / 30-11-2022
DEPARTEMEN / LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
PROVINSI / KABUPATEN : Prop. Irian Jaya / Kota Jayapura
SATKER : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
KPPN : JAYAPURA

NO	MAP	URAIAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	TARGET	JUMLAH S/D BULAN YANG LAIU	JUMLAH PENERIMAAN BULAN INI	JUMLAH PENERIMAAN S/D BULAN INI
1		Pendapatan Kejaksaan/Peradilan				
	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	Rp. 0	Rp. 1.470.000	Rp. 130.000	Rp. 1.600.000
	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	Rp. 0	Rp. 3.140.000	Rp. 130.000	Rp. 3.270.000
	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	Rp. 0	Rp. 15.550.500	Rp. 398.000	Rp. 15.948.500
		JUMLAH I	Rp. 0	Rp. 20.160.500	Rp. 658.000	Rp. 20.818.500
		JUMLAH I s/d I	Rp. 0	Rp. 20.160.500	Rp. 658.000	Rp. 20.818.500

Mengetahui
Sekretaris
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

Jayapura, 29 Desember 2023
Bendahara Penerimaan
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA



Feri Yanti Thomas, SE
NIP. 197903102006042002

CHRISTINA MEGAWATI YULIANA ROHROMANA, S.H.
NIP. 198508172019032006

LAMPIRAN 5

LAPORAN PERKARA (LI- T1, LI – T2, LI- T3, LI- T4, LI- T5, LI – T6)

LAPORAN KEADAAN PERKARA
BULAN DESEMBER TAHUN 2023

FORMULIR LI-T1

NO	NOMOR PERKARA	TANGGAL PENERIMAAN	DISTRIBUSI		ACARA SINGKAT				ACARA BERAKHIR CEPAT				SSA AKHIR		NOMOR PERKARA BELUM DIBENTAS	KETERANGAN			
			TANGGAL PENGALAMAN	TANGGAL PENGALAMAN	TANGGAL TERBUKA PERUNTUK PERUNTUK	TANGGAL PERUNTUK PERUNTUK	TANGGAL PERUNTUK PERUNTUK	TANGGAL PERUNTUK PERUNTUK	TANGGAL PERUNTUK PERUNTUK	TANGGAL PERUNTUK PERUNTUK	TANGGAL PERUNTUK PERUNTUK	TANGGAL PERUNTUK PERUNTUK	TANGGAL PERUNTUK PERUNTUK	TANGGAL PERUNTUK PERUNTUK					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	20/02/2023/PTUN.JPR	20-07-2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KETUA : JUSAK SINDAR, SH
2	21/02/2023/PTUN.JPR	01-09-2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	WAKIL KETUA : MERNA GINTHA, S.H., M.H
3	21/02/2023/PTUN.JPR	28-09-2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	HAKIM-HAKIM
4	20/02/2023/PTUN.JPR	11-09-2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1. YUSUF KUMEN, SH
5	21/02/2023/PTUN.JPR	19-09-2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2. RANA ANVA, SH, MH
6	20/02/2023/PTUN.JPR	24-10-2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3. DONTI POUA, SH
7	31/02/2023/PTUN.JPR	31-10-2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PANITERA / PENGANTAR
8	31/02/2023/PTUN.JPR	18-11-2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1. SUIYADI, SH
9	30/02/2023/PTUN.JPR	28-11-2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2. ADERUDANTO
10	30/02/2023/PTUN.JPR	30-11-2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3. JERKA W. RISAKOTTA, SH, MH
																			4. PERUS MITING, SH
																			5. DAVID ALIK MITING, SH
																			6. ELIZABETH KAKATUDY, SH
																			7. EFRIM YOSEPH PATTY, S.H., M.H
																			8. KOMARUDIN, SH
																			REKAPITULASI
																			1. Sisa Bulan Lalu : 10
																			2. Masih Bulan ini : -
																			3. : Plus
																			- Diambil
																			- Cabut
																			4. Sisa Bulan Ini : 9
																			5. Belum di bagi
																			6. Belum di Paka
																			7. Dalam Nundasi

Jayapura, 29 Desember 2023



PANITERA,
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

SUYADI

LAPORAN JENIS PERKARA
BULAN DESEMBER TAHUN 2023

Formulir LI - T2

NO	JENIS PERKARA	PERKARA						PENGUGAT		TERGUGAT		PERLAWANAN		PUTUSAN						Permohonan						Telima Berkas			KET.				
		SISA BULAN LALU						MASUK	DICABUT	JUMLAH	PERORANGAN	BADAN HUKUM	PUSAT	DAERAH	DISMISSAL	DITOLAK	DIKABULKAN	GUGUR	DICABUT	DITOLAK	TIDAK DITERIMA	DIKABULKAN	JUMLAH	SISA PERKARA BULAN INI						BANDING	KASASI	PENINJAUAN KEMBALI	BANDING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
A	GUGATAN	7	-	1	6	6	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	1	-	-	2	-	-	-						
1	Pertanahan	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-						
2	Kepegawalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
3	Perijinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
4	Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
5	Tender/Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
6	Badan Hukum/Parpol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
7	Kepala Desa dan Perangkat desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
8	Kepala Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
9	Proses Pemilihan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
10	Pergarilan Antar Waktu (PAW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
11	Ketenagakerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
12	Sengketa Informasi Publik/KIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
13	Pengadaan Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
14	Fiktif Positif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
13	KIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
15	Penyalahgunaan Wewenang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
16	Tindakan Administrasi Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
17	Tindakan Faktual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
18	Merek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
19	Lain - Lain	2	-	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-						
JUMLAH		10	-	1	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2	2	-	-	3	-	-	-						

Jayapura, 29 Desember 2023

Mendatuhui :
Wakil Ketua,
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

PANITERA,
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura



SUYADI

[illegible]

PANITERA,
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura



SUYAB

LAPORAN PELAKSANAAN POSBAKUM
BULAN DESEMBER 2023

Formulir LI - T4

NO	NOMOR PERKARA	TANGGAL	NAMA PENERIMA JASA	NAMA ORGANISASI PEMBERI JASA	KEDUDUKAN PEMOHON BANTUAN	JENIS JASA BANTUAN	KETERANGAN
1	-	04-12-2023	Veni Griet De Freitas	ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM, LEMBAGA BANTUAN HUKUM PAPUA JUSTICE & PEACE, YULYANTO SH., MH. Tlp. 0811486998, Jl. Jeruk Nipis Depan RS-POLRI Belayangkara, Jayapura-Papua	Pemohon	Konsultasi Hukum Terkait Pemutusan Hubungan Kerja Sefhak	
2	-	04-12-2023	Lizah F. Mandosir		Pemohon	Konsultasi Terkait Masalah Pemutusan Hubungan Kerja	
3	-	05-12-2023	Jibrael Gusti Waroi		Pemohon	Konsultasi Hukum Terkait Masalah Tanah	
4	-	05-12-2023	Antoni Anca Waromi		Pemohon	Konsultasi Hukum Terkait Gugatan CeraI	
5	-	06-12-2023	Sungai Fonataba		Pemohon	Konsultasi Hukum Terkait Penambahan Marga	
6	-	06-12-2023	Immanuel M. Waromi		Pemohon	Konsultasi Hukum Terkait Pencemaran Nama Baik	
7	-	07-12-2023	Yan Melki Mantani		Pemohon	Konsultasi Terkait Nama Dalam DPO Tindak Pidana	
8	-	07-12-2023	Rosalindo Pulalo		Pemohon	Konsultasi Hukum Terkait Tanah	
9	-	08-12-2023	Kardulino Karubaba		Pemohon	Konsultasi Terkait Pengangkatan Anak	
10	-	11-12-2023	Gerson Rampalo		Pemohon	Konsultasi Hukum Terkait Sengketa Tanah	
11	-	12-12-2023	Husrian		Pemohon	Konsultasi Hukum Terkait Penambahan Marga	
12	-	13-12-2023	Urix Wasturi		Pemohon	Konsultasi Hukum Terkait Gugatan CeraI	

NO	NOMOR PERKARA	TANGGAL	NAMA PENERIMA JASA	NAMA ORGANISASI PEMBERI JASA	KEDUDUKAN PEMOHON BANTUAN	JENIS JASA BANTUAN	KETERANGAN
13	-	14-12-2023	Romean Habary	ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM, LEMBAGA BANTUAN HUKUM PAPUA JUSTICE & PEACE, YULYANTO, SH., MH. Tlp. 0811488998, Jl. Jenuk Nipis Depan RS-POLRI Bhayangkara, Jayapura-Papua	Pemohon	Konsultasi Terkait Pengalukan Kasasi	
14	-	15-12-2023	Lizeth Febriyanti		Pemohon	Konsultasi Hukum Terkait Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak	
15	-	19-12-2023	Markus Marani		Pemohon	Konsultasi Hukum Terkait Permohonan Perbaikan Akta Kelahiran Anak	
16	-	19-12-2023	Natalia Setianingsih Ayu		Pemohon	Konsultasi Hukum Terkait Hak Asuh Anak	
17	-	20-12-2023	Djems Bindosano		Pemohon	Konsultasi Hukum Terkait Masalah Tanah	
18	-	20-12-2023	Matahari Saputri Ali		Pemohon	Konsultasi Hukum Terkait Masalah Hak Asuh Anak	
19	-	28-12-2023	Juria Surlani Marani		Pemohon	Konsultasi Hukum Terkait Permohonan Penambahan Marga	
20	-	29-12-2023	Marlin Y. Wamemon		Pemohon	Konsultasi Hukum Terkait Masalah PTDH dan Dinas Kepolisian Polda Papua	

Jayapura, 29 Desember 2023



PANITERA
Pengadilan Tata Usaha Negara

SUTADI

Formulir L1-T5

Jayapura, 29 Desember 2023

WAKIL KETUA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

14

13

**LAPORAN KEUANGAN PERKARA
(PENGADILAN TINGKAT PERTAMA)
BULAN DESEMBER TAHUN 2023**

Biaya Perkara/Panjar Biaya Perkara

Form : LI-T7

No.	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	54,302,000	-	-	54,302,000
2	Penerimaan	-	7,364,500	-	7,364,500
3	Alat Tulis Kantor	-	-	375,000	375,000
4	Biaya Panggilan	-	-	151,000	151,000
5	Biaya Pemberitahuan	-	-	147,000	147,000
6	Biaya Pemeriksaan Setempat	-	-	-	-
7	Biaya Pemberkasan Dan Pengiriman Berkas	-	-	600,000	600,000
8	Biaya Pengiriman	-	-	-	-
9	Materai	-	-	-	-
10	PNBP:	-	-	-	-
	a. Biaya Pendaftaran	-	-	250,000	250,000
	b. Redaksi	-	-	-	-
	c. PNBP Lain-lain	-	-	824,500	824,500
11	Pengembalian Sisa Panjar kepada Pihak	-	-	-	-
12	Pengembalian Sisa Panjar kepada Negara	-	-	-	-
13	Biaya Lain-lain	-	-	-	-
	Jumlah	54,302,000	7,364,500	2,347,500	59,319,000

Biaya Proses/ATK/Pemberkasan

No.	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	12.226.500	-	-	12.226.500
2	Penerimaan	-	375,000	-	375,000
3	Pengeluaran (untuk seluruh pembelian ATK secara riil, tidak perlu dirinci satu persatu)	-	-	-	-
	Jumlah	12.226.500	375,000	-	12.601.500

Biaya Eksekusi

No.	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	1,521,000	-	-	1,521,000
2	Penerimaan	-	-	-	-
3	Alat Tulis Kantor	-	-	-	-
4	Materai	-	-	-	-
5	Biaya Surat Panggilan	-	-	-	-
6	Biaya Surat Pemberitahuan	-	-	86,000	86,000
7	Hak-hak Kepaniteraan	-	-	20,000	20,000
8	Surat Pemberitahuan Kepada Presiden/DPR	-	-	-	-
9	Pengumuman Media Cetak	-	-	-	-
10	Pengembalian Sisa Panjar	-	-	-	-
11	Lain-lain	-	-	-	-
	Jumlah	1,521,000	-	106,000	1,415,000

Jayapura, 29 Desember 2023

WAKIL KETUA,
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura



PANITERA,
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

[Signature]
SUYADI



LAPORAN TRANSAKSI FINANSIAL
STATEMENT OF FINANCIAL TRANSACTION

Halaman 1 dari 2
Page 1 of 2

Kepada Yth. / To :

RPL 063 PTUN JAYAPURA PDT BIAYA
PERKARA
JALAN RAYA SENTANI WAENA Rt.001/001,-KOTA
JAYAPURA HERAM KOTA JAYAPURA

Tanggal Laporan : 02/01/24
Statement Date
Periode Transaksi : 01/12/23 - 30/12/23
Transaction Period

No. Rekening : 21420100003307
Account No

Nama Produk : Giro Tres.NotP
Product Name

Valuta : IDR
Currency

Unit Kerja : KCP WAENA
Business Unit

Alamat Unit Kerja : WAENA
Business Unit Address
JAYAPURA

Tanggal Transaksi Transaction Date	Uraian Transaksi Transaction Description	Teller User ID	Debet Debit	Kredit Credit	Saldo Balance
04/12/23 07:55:27	BFVA19845493231200002 YULIYANTO:BNINIDJA 20231204BNINIDJA01000214509407 ESB:BFST:0008N:2023120468324083	8888653	0,00	520,000.00	50,274,900.00
05/12/23 08:31:19	BRIVA19845493231200003NBMBMARUDDIN RADJA BRIVA 19845493231200003NBMBMARUDDIN RADJ ESB:NBMB:0200200P:618112691975	8888148	0,00	43,500.00	50,318,400.00
06/12/23 08:46:13	BRIVA19845493231200004NBMBAGUSTINUS SHIM BRIVA 19845493231200004NBMBAGUSTINUS SHIM ESB:NBMB:0200200P:618619664093	8888364	0,00	34,500.00	50,352,900.00
11/12/23 09:55:15	BRIVA19845493231200005NBMBKEPALA KANTOR BRIVA 19845493231200005NBMBKEPALA KANTOR ESB:NBMB:0200200P:620810562402	8888407	0,00	13,500.00	50,366,400.00
12/12/23 10:19:46	BFVA19845493231200006 DOMINGGUS:BMRIIDJA 20231212BMRIIDJA01000226007528 ESB:BFST:0008N:2023121213686277	8888646	0,00	470,000.00	50,836,400.00
12/12/23 10:50:39	BFVA19845493231200007 DOMINGGUS:CENAIIDJA 20231212CENAIIDJA01000279158224 ESB:BFST:0008N:2023121216637274	8888641	0,00	34,500.00	50,870,900.00
12/12/23 17:12:41	BFVA19845493231200008 ROMEON HA:BMRIIDJA 20231212BMRIIDJA01000221319863 ESB:BFST:0008N:202312121251799241	8888610	0,00	13,500.00	50,884,400.00
14/12/23 06:54:03	BRIVA19845493231200009NBMBWILLIAM HALASH BRIVA 19845493231200009NBMBWILLIAM HALAS ESB:NBMB:0200200P:622109993213	8888083	0,00	25,000.00	50,909,400.00
15/12/23 16:56:49	BFVA19845493231200010 RAYMOND R:BMRIIDJA 20231215BMRIIDJA01000228429625 ESB:BFST:0008N:2023121507202237	8888703	0,00	16,500.00	50,925,900.00
15/12/23 21:11:10	BRIVA19845493231200011NBMBPT BAGUS JAYA BRIVA 19845493231200011NBMBPT BAGUS JAYA ESB:NBMB:0200200P:622907491507	8888108	0,00	16,500.00	50,942,400.00
19/12/23 15:09:39	BRIVA19845493231200012NBMBHASNIAH SH MH BRIVA 19845493231200012NBMBHASNIAH SH MH ESB:NBMB:0200200P:624466184923	8888215	0,00	13,000.00	50,955,400.00

Created By BRISIM
01/02/2024 01:23:31 PM



LAPORAN TRANSAKSI FINANSIAL
STATEMENT OF FINANCIAL TRANSACTION

Halaman 2 dari 2
Page 2 of 2

Tanggal Transaksi Transaction Date	Uraian Transaksi Transaction Description	Teller User ID	Debet Debit	Kredit Credit	Saldo Balance
19/12/23 17:04:48	ATMLTRPRM 88701 000084565 21420100000330 TRF PRIMA FROM HASNIAH ATMLTRPRM 88701 000084565 214201000003307	0888749	0.00	2,000,000.00	52,955,400.00
20/12/23 07:18:15	4616993234187809#000000006371#ATM #TRFHM TRF LINK FROM THOMAS PEMBWA LN 214201000003307ATM 4616993234187809	0888018	0.00	2,000,000.00	54,955,400.00
20/12/23 10:04:43	BRIVA19845493231200014NBMBTHOMAS PENBWA BRIVA 19845493231200014NBMBTHOMAS PENBWA ESB:NBMB:0200200P:624781911339	8888117	0.00	16,500.00	54,971,900.00
20/12/23 15:39:22	KorATMMP04:4617003759511729:231219:19336 KorTrfIssMPAcqBRIBenBRI:00019336: ESB:T:0391891:S:0391892:ATMMerahPutih	0391891	0.00	13,000.00	54,984,900.00
20/12/23 15:39:22	KorATMMP04:4617003759511729:231219:19338 KorTrfIssMPAcqBRIBenBRI:00019338: ESB:T:0391891:S:0391892:ATMMerahPutih	0391891	0.00	13,000.00	54,997,900.00
20/12/23 15:39:22	KorATMMP04:4617003759511729:231219:19280 KorTrfIssMPAcqBRIBenBRI:00019280: ESB:T:0391891:S:0391892:ATMMerahPutih	0391891	0.00	13,000.00	55,010,900.00
20/12/23 22:11:29	ATMLTRPRM 00083283619845493231200015 TRF PRIMA FROM	0888193	0.00	36,500.00	55,047,400.00
23/12/23 19:59:23	BFVA19845493231200016 DR SEMY B:BMRIIDJA 20231223BMRIIDJA01000220691143 ESB:BFST:0008N:2023122397168802	8888681	0.00	13,000.00	55,060,400.00
28/12/23 04:44:25	BRIVA19845493231200017NBMBTHOMAS PENBWA BRIVA 19845493231200017NBMBTHOMAS PENBWA ESB:NBMB:0200200P:628130622625	8888346	0.00	59,000.00	55,119,400.00
28/12/23 08:11:05	BFST214201000003307ROMEON HABAR:BMRIIDJA 20231228BMRIIDJA01000227826802 ESB:BFST:0008N:20231228FASTIDJA01020315178	8888633	0.00	2,000,000.00	57,119,400.00

Saldo Awal Opening Balance	Total Transaksi Debet Total Debit Transaction	Total Transaksi Kredit Total Credit Transaction	Saldo Akhir Closing Balance
49,754,900.00	0.00	7,364,500.00	57,119,400.00

Terbilang / In Words

LIMA PULUH TUJUH JUTA SERATUS SEHBILAN BELAS RIBU EMPAT RATUS RUPIAH
FIFTY SEVEN MILLION ONE HUNDRED NINETEEN THOUSAND FOUR HUNDRED RUPIAH

Biaya materai telah dibayar Lunas
Revenue Stamp Paid

- Apabila terdapat perbedaan dengan catatan Saudara, harap menghubungi kami selambat-lambatnya 14 hari sejak diterimanya rekening koran ini.
- In the case of any differences from your records, please contact us within not later than 14 days from the receipt of this Statement of Account
- Salinan rekening koran ini merupakan hasil cetakan komputer, tidak diperlukan tanda tangan pejabat Bank
- The copy of this Statement of Account is computer-generated, no official signature is required.
- Apabila ada perubahan alamat email mohon diinformasikan pada Unit Kerja BANK BRI
- Should there be any change of email address, please notify the relevant Bank BRI Business Unit